

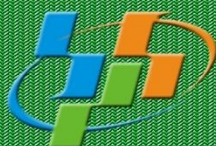


Katalog BPS: 9302008.1809

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2011



KABUPATEN PESAWARAN



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PESAWARAN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT LAPANGAN USAHA
2011**

<http://pesawaran.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2011

ISSN : 2085-899X

No. Publikasi : 18095.1203

Katalog BPS : 9302008.1809

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman : vi + 56 halaman

Naskah : BPS Kabupaten Pesawaran

Penyunting : BPS Kabupaten Pesawaran

Gambar Kulit : BPS Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan oleh : BPS Kabupaten Pesawaran

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Salah satu indikator makro ekonomi regional yang penting digunakan dalam menyusun rencana pembangunan kabupaten/kota adalah data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data ini juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sampai sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran pada tahun ini menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha 2011.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2000. Sedangkan untuk penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga rata-rata pada tahun yang bersangkutan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama dinas/instansi dan swasta yang turut berpartisipasi sehingga terlaksananya penerbitan ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pemakainya.

Gedong Tataan, Oktober 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran



RISMA PIJAYANTINI, S.Si.
NIP. 19630609 198601 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional.....	2
1.3. Konsep dan Definisi.....	3
1.4. Metode Penghitungan Pendapatan Regional.....	7
1.4.1. Metode Langsung.....	8
1.4.2. Metode Tidak Langsung.....	9
1.5. Penyajian Angka Indeks.....	10
1.5.1. Indeks Perkembangan.....	10
1.5.2. Indeks Berantai.....	10
1.5.3. Indeks Implisit.....	11
1.6. Penghitungan Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan.....	11
1.6.1. Revaluasi.....	11
1.6.2. Ekstrapolasi.....	12
1.6.3. Deflasi.....	12
1.6.4. Deflasi Berganda.....	12
1.7. Perubahan Tahun Dasar PDRB Dari Tahun 1993 ke Tahun 2000.....	13
II. PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	15
III. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2007-2011.....	31
3.1. Struktur Ekonomi.....	32
3.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	34
3.3. PDRB Per Kapita.....	37
IV. Perbandingan Dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	40
4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung..	40
4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	41
4.3. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	42
Tabel-tabel.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1. Sumbangan Setiap Sektor Ekonomi Terhadap Perekonomian Kabupaten Pesawaran Tahun 2007-2011 (Persen).....	33
Tabel 3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor di Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2011 (Persen).....	36
Tabel 3.2.2. Peran Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 (Persen).....	37
Tabel 4.1.1. Perbandingan Nilai dan Sumbangan PDRB adhb Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2010-2011.....	41
Tabel 4.3.1. PDRB adhb Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 (Rupiah).....	44
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah).....	46
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah).....	47
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Persen).....	48
Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (Persen).....	49
Tabel 5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011 (Persen).....	50
Tabel 6. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011 (Persen).....	51
Tabel 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Persen).....	52
Tabel 8. Pendapatan Regional dan Angka-angka Perkapita Kabupaten Pesawaran Tahun 2007-2011.....	53
Tabel 9. Pertumbuhan Regional dan Angka-angka Perkapita Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2011 (Persen).....	54

Tabel 10.	Indeks Harga Implisit Pendapatan Regional dan Angka-angka Perkapita Kabupaten Pesawaran Tahun 2007-2011	55
Tabel 11.	Peran Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2010	56

<http://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah).....	32
Gambar 3.1.1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2011.....	34
Gambar 3.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2011 (Persen).....	35
Gambar 3.3.1.	PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) Tahun 2007-2011 (Rupiah).....	39
Gambar 4.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 (Persen).....	42
Gambar 4.2.2.	PBRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 (Rupiah).....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia senantiasa bertumpu pada azas pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tidak hanya milik sekelompok orang atau golongan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu seluruh komponen bangsa mempunyai andil atau peran dalam mensukseskan pembangunan menuju cita-cita bersama yang diharapkan. Peran itu dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pada beberapa sektor ekonomi yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam menggalang berbagai potensi dan kekuatan ekonomi tersebut harus disusun suatu kerangka atau program yang terencana sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah dan dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien.

Memasuki era persaingan global pada saat ini, tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia semakin besar yang mengharuskan Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara lebih efektif dengan sasaran yang lebih terarah. Bangsa Indonesia juga harus cukup memahami keunggulan-keunggulan komparatif yang dimiliki agar produk yang dihasilkan benar-benar menguntungkan dan memberikan nilai tambah yang cukup besar.

Mengingat bahwa pembangunan merupakan suatu sistem yang kompleks maka diperlukan suatu keselarasan atau pedoman sebagai acuan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan lebih efektif. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan kondisi fundamental ekonomi, struktur permodalan dan tingkat kepentingan masyarakat menurut urgensinya.

Kabupaten Pesawaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang secara intensif dan komprehensif. Untuk itu perencanaan yang baik berdasarkan indikator yang relevan dan

didukung oleh data yang akurat mutlak diperlukan. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menyajikan antara lain peran atau kontribusi terhadap PDRB dan pertumbuhan masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi sektor terhadap PDRB dapat dilihat sektor-sektor mana yang mempunyai peran yang cukup besar namun sudah mengalami titik jenuh (stagnasi) dan sebaliknya sektor-sektor mana yang masih bisa dipacu. PDRB juga dapat memberikan gambaran pertumbuhan masing-masing sektor, sehingga secara umum dapat dilihat sektor-sektor mana yang cukup tinggi pertumbuhannya dan sektor-sektor mana yang lambat pertumbuhannya padahal sebenarnya mempunyai prospek yang cukup baik. Selain angka pertumbuhan dan peran masing-masing sektor, PDRB juga menyajikan angka-angka perkapita dan inflasi di tingkat produsen.

1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Salah satu indikator makro ekonomi untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah PDRB sektoral. Angka-angka yang disajikan dalam setiap tabel pada PDRB sektoral ini dapat digunakan untuk menganalisis : (1) struktur perekonomian daerah, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) tingkat kemakmuran, (4) kemampuan daerah mengelola sumber daya, dan (5) perubahan harga.

Kontribusi setiap sektor ekonomi dalam PDRB akan menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi tersebut dinyatakan dalam persentase, yang menggambarkan peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Angka-angka tersebut juga menunjukkan besarnya ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonominya. Dengan menggunakan series data dari struktur ekonomi ini, dapatlah diketahui perubahan struktur perekonomian yang terjadi dari waktu ke waktu sebagai hasil suatu proses pembangunan.

Dalam setiap proses pembangunan seyogyanya akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, angka ini biasanya digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dijadikan dasar untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang dalam usaha meningkatkan kemakmuran penduduk.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah pendapatan perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk karena keikutsertaannya dalam proses produksi.

Kedua bentuk pendapatan perkapita di atas diperoleh dari hasil bagi antara total nilai PDRB atau PDRN dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan nilai nominal PDRB itu sendiri menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada kedua faktor tersebut.

Nilai nominal PDRB di atas, dapat diturunkan menjadi PDRB deflator atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen. Fluktuasi harga ini akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Bila disajikan dalam bentuk indeks perkembangan, indeks implisit dapat menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu.

1.3. Konsep dan Definisi

Untuk lebih memudahkan penggunaan data Statistik Pendapatan Regional, beberapa konsep dan definisi yang perlu diketahui :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari seluruh sektor perekonomian di dalam suatu wilayah/daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate input*). Nilai tambah bruto mencakup komponen faktor produksi; upah dan gaji, bunga modal, sewa tanah, keuntungan, penyusutan, serta pajak tak langsung netto. Faktor pendapatan adalah merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), tanah (*land*), managerial (*entrepreneur*).

PDRB dapat ditinjau dari berbagai segi, dengan pengertian masing-masing adalah :

- (1). Segi Produksi; merupakan jumlah nilai tambah bruto dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah/daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.
- (2). Segi Pendapatan; merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.
- (3). Segi Pengeluaran; merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba/lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu wilayah/daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB yang dikurangi dengan penyusutan (*depreciation*). Penyusutan terjadi karena aus/susutnya barang modal selama berproduksi, seperti mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain.

c. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi dari pemerintah. Pajak tidak langsung tersebut terdiri dari pajak penjualan, bea ekspor, cukai, dan pajak tidak langsung lainnya. Pajak tidak

langsung dibebankan kepada pembeli/konsumen, sehingga pengenaan pajak ini akan menaikkan harga barang. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu para konsumen sehingga harga menjadi turun dan dapat dijangkau oleh daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi lainnya. Selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi disebut dengan pajak tidak langsung netto.

d. Pendapatan Regional

Dari konsep/definisi di atas dapat disimpulkan bahwa PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah. Dapat juga dikatakan bahwa PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan berupa upah dan gaji, bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan (surplus usaha). PDRN atas dasar biaya faktor tidak seluruhnya menjadi milik daerah/wilayah, karena di dalamnya termasuk pendapatan penduduk wilayah lain. Sebaiknya PDRN tersebut harus pula ditambah dengan pendapatan penduduknya yang diperoleh dari daerah lain.

Bila pendapatan penduduk yang masuk (*income inflow*) dan keluar (*income outflow*) dapat dicatat, atau dengan kata lain PDRN atas dasar biaya faktor ditambah dengan pendapatan netto antara wilayah/daerah, maka diperoleh pendapatan regional (Produk Regional Netto).

Oleh karena sulitnya memperoleh data pendapatan masuk dan pendapatan keluar dalam suatu wilayah/daerah, maka PDRN atas dasar biaya faktor diasumsikan sama dengan pendapatan regional (Produk Regional Netto), atau dengan kata lain pendapatan netto (pendapatan masuk – pendapatan keluar) dianggap sama dengan nol.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan perkapita tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan/produk regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Dari uraian di atas (butir a sampai e) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1). Produk Domestik Regional Brutto atas dasar harga pasar (*gross regional domestic product at market prices*) bila dikurangi penyusutan akan diperoleh :
- (2). Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar (*net regional domestic product at market prices*), bila dikurangi pajak tidak langsung netto (pajak tidak langsung – subsidi) akan diperoleh :
- (3). Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor (*net regional domestic product at factor cost*), bila ditambah dengan pendapatan netto (pendapatan masuk – pendapatan keluar) akan sama dengan :
- (4). Pendapatan Regional (*Regional Income*), bila dikurangi dengan pajak pendapatan perusahaan (*corporate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*), ditambah dengan transfer yang diterima rumahtangga, bunga netto atas hutang pemerintah, akan sama dengan :
- (5). Pendapatan perorangan (*personal income*), bila dikurangi pajak rumahtangga, transfer yang dibayar rumahtangga, akan sama dengan :
- (6). Pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

f. Produk Domestik dan Produk Regional

Di dalam literatur ekonomi terdapat perbedaan pengertian produk domestik dengan produk regional. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari kegiatan produksi yang dilakukan di suatu daerah, beberapa faktor produksinya berasal dari wilayah/daerah lain, seperti tenaga kerja, mesin/alat, bahkan modal untuk investasi. Dengan keadaan demikian menyebabkan nilai produksi di wilayah/daerah atau domestik tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah (termasuk juga yang mengalir dari/ke luar negeri). Arus pendapatan tersebut pada umumnya terdiri dari upah/gaji, deviden, dan keuntungan, akhirnya timbullah perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam wilayah/daerah tersebut, kemudian dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar wilayah/daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal dan *entrepreneur*) yang dimiliki penduduk wilayah/daerah yang bersangkutan.

Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu wilayah/daerah, maka antara produk domestik dan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama.

g. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pendapatan regional menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah/daerah. Perkembangan tersebut sebenarnya didasarkan atas beberapa faktor :

(1). Perubahan Harga

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung naik sehingga pendapatan regional atas dasar harga yang berlaku dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan.

(2). Perubahan Riil

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang dihitung berdasarkan perubahan riil, artinya tidak termasuk lagi pengaruh harga. Pengertian yang umum digunakan yaitu pendapatan yang telah dihilangkan pengaruh inflasinya.

Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Pendapatan regional atas dasar harga konstan inilah yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.4. Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Dalam penghitungan pendapatan regional terdapat dua metode yang digunakan, yaitu :

- a. Metode langsung
- b. Metode tidak langsung

1.4.1. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan, tidak termasuk data yang diperoleh dari angka nasional atau daerah lain. Pada prinsipnya metode langsung ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu :

- (1). Pendekatan produksi
- (2). Pendekatan pendapatan
- (3). Pendekatan pengeluaran

(1). Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi dilakukan bila tersedia data produksi dari masing-masing sektor. Nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang terjadi dihitung dengan cara mencari selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah tersebut akan sama dengan balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi.

Pendekatan ini umumnya digunakan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang, seperti sektor pertanian, pertambangan, penggalian dan industri.

(2). Pendekatan Pendapatan

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan pendapatan adalah dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor-faktor produksi (upah/gaji, surplus usaha) termasuk juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). Di dalam surplus usaha termasuk bunga modal netto (selisih bunga yang diterima dengan yang dibayarkan), sewa tanah dan keuntungan (*profit*).

Di dalam sektor-sektor yang tidak mencari keuntungan (non profit making) termasuk sektor pemerintah, surplus usahanya tidak diperhitungkan, karena outputnya berupa pelayanan kepada sektor yang produksinya berupa jasa (sektor pemerintah), hal tersebut dilakukan karena data produksi dan biaya antara yang tersedia tidak lengkap.

(3). Pendekatan Pengeluaran

Penghitungan nilai tambah berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menghitung penggunaan akhir dari barang-barang dan jasa yang diproduksi. Jadi produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara makro penggunaan akhir dari barang/jasa tersebut digunakan untuk :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (lembaga nirlaba)
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- d. Pembentukan modal tetap bruto
- e. Perubahan stok
- f. Ekspor netto (ekspor – impor).

1.4.2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan penghitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar wilayah/daerah yang bersangkutan, seperti data nasional. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi, yaitu dengan cara mengalokasikan data dari luar daerah ke daerah yang bersangkutan. Cara ini menggunakan suatu alokator yang cocok dengan sektor/kegiatan masing-masing. Metode tidak langsung ini sedapat mungkin dihindari, karena mengandung banyak kelemahan, penggunaannya baru dilakukan bila data sama sekali tidak tersedia.

1.5. Penyajian Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan yang diuraikan sebelumnya, disajikan dalam dua bentuk; atas dasar harga yang berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan/tetap (*at constant price*). Dari kedua penyajian tersebut, terdapat perbedaan antara lain :

- a. Penyajian atas dasar harga yang berlaku, menunjukkan agregat pendapatan dinilai menurut harga yang terjadi di pasar, baik untuk menilai produksi maupun biaya antara. Termasuk juga penyajian PDRB menurut penggunaan (konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor netto).
- b. Penyajian atas dasar harga konstan, yaitu agregat pendapatan yang dinilai menurut harga tetap/konstan. Baik produksi maupun biaya antara dinilai menurut harga tahun dasar sehingga akan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan secara riil dari tahun ke tahun.

Selain itu agregat pendapatan disajikan pula dalam bentuk angka indeks, antara lain indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit. Secara rinci pengertian masing-masing indeks tersebut diuraikan di bawah ini.

1.5.1. Indeks Perkembangan

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan pendapatan/perekonomian dari tahun ke tahun yang dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks tersebut diperoleh dengan membagi nilai agregat pendapatan masing-masing tahun dengan nilai tahun dasar dalam persentase.

1.5.2. Indeks Berantai

Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan atau yang lebih populer disebut dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh indeks berantai atas dasar harga konstan. Indeks tersebut

diperoleh dengan membandingkan agregat pendapatan dengan tahun sebelumnya dalam persentase.

1.5.3. Indeks Implisit

Indeks ini merupakan indikator tingkat perkembangan harga dibandingkan harga pada tahun dasar. Bila dari data ini disusun indeks berantainya akan menunjukkan perkembangan harga dari tahun ke tahun secara makro. Indeks implisit ini diperoleh dengan cara membagi agregat harga berlaku dengan harga konstan pada tahun yang sama dalam persentase.

1.6. Penghitungan Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan

Pendapatan Regional atas dasar harga konstan ini sangat banyak kegunaannya, terutama bagi para penentu kebijaksanaan (*decision maker*) untuk menentukan sasaran pembangunan di masa datang. Bagi dunia usaha akan dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi produksi, distribusi dan pemasaran produk yang dihasilkan.

Penghitungan pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan sangat tergantung dengan tersedianya data dari sektor ekonomi yang bersangkutan.

1.6.1. Revaluasi

Yang dimaksud dengan cara revaluasi adalah menilai produksi dan biaya produksi masing-masing tahun dengan harga yang terjadi pada tahun dasar (publikasi ini menggunakan harga tahun 2000). Dengan demikian akan dapat menggambarkan perkembangan kuantitas produksi dari tahun ke tahun.

Dalam praktek sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara, karena terdiri dari berbagai jenis input (komponen biaya), sehingga harus dinilai menurut harga masing-masing komponen. Pada umumnya biaya antara atas dasar harga konstan diperoleh dari

perkalian antara output (nilai produksi) dengan ratio tetap biaya antara. Ratio tersebut didapat dari survei khusus yang dikenal dengan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR).

1.6.2. Ekstrapolasi

Ekstrapolasi dilakukan dengan mengalikan nilai tambah tahun dasar (2000) dengan indeks produksi masing-masing kegiatan/komoditi. Di samping indeks produksi sektor yang bersangkutan, dapat juga digunakan indeks yang mewakili atau diasumsikan sama dengan gerakan produksi, seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan lain-lain.

Metode ekstrapolasi dapat pula dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, yaitu mengalikannya dengan rasio tetap nilai tambah. Rasio nilai tambah merupakan perbandingan nilai tambah dengan nilai output suatu komoditi/kegiatan/sektor, yang didapatkan dari survei khusus (SKPR).

1.6.3. Deflasi

Metode deflasi digunakan untuk mendapatkan nilai tambah harga konstan, yaitu dengan membagi nilai tambah harga berlaku dengan indeks harga masing-masing tahun. Indeks harga yang dapat digunakan antara lain indeks harga komoditi yang bersangkutan atau indeks harga yang diasumsikan sejalan dengan perkembangan harga komoditi tersebut, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB) dan lain-lain.

Disamping itu indeks harga dapat pula digunakan sebagai inflator, untuk mendapatkan nilai tambah atas dasar harga yang berlaku, yaitu mengalikan nilai tambah harga konstan dengan indeks harga.

1.6.4. Deflasi Berganda (*Double Deflation*)

Untuk mendapatkan nilai tambah harga konstan dapat juga dilakukan dengan mendeflate nilai output dan biaya antara atas dasar harga berlaku. Selisih output dengan biaya antara yang telah dideflate akan didapatkan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Dalam kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, hal ini disebabkan karena belum tersedia data harga berbagai jenis input yang digunakan dalam memproduksi. Oleh sebab itu dalam estimasi nilai tambah konstan, metode deflasi berganda belum digunakan.

1.7. Perubahan Tahun Dasar PDRB Dari Tahun 1993 ke Tahun 2000

Mulai tahun 2005 BPS memberlakukan penggunaan tahun dasar baru dalam mengestimasi data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yakni tahun dasar 2000. Sejalan dengan upaya perubahan tahun dasar tersebut, dilakukan pula upaya untuk memperbaiki metoda estimasi; cakupan jenis komoditas atau unit kegiatan ekonomi; dan dilakukan upaya penyesuaian data dasar yang digunakan serta sumber datanya. Semua upaya ini dilakukan agar angka estimasi PDRB lebih mencerminkan kondisi perekonomian terkini yang terus berkembang.

Alasan teknis yang mendorong BPS untuk melakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan PDRB adh Konstan 1993 adalah :

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas tahun dasar 1993 semakin tidak realistis. Hal ini disebabkan pada tingkat nasional terjadi perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat, sehingga hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah dari semestinya.
- b. Struktur perekonomian di tahun 1993 tidak terpengaruh oleh dampak deregulasi dan debirokratisasi. Pada tingkat nasional sektor pertanian sangat dominan, sementara sektor industri masih relatif lebih kecil peranannya. Namun sejak tahun 1991 peranan sektor Industri telah melampaui sektor pertanian.
- c. Sungguhpun tingkat pertumbuhan sektor industri lebih tinggi dari sektor pertanian, namun tingkat pertumbuhan secara keseluruhan akan semakin tidak realistis. Hal ini akan terlihat semakin nyata untuk tahun yang semakin jauh dari tahun 1993.

- d. Kantor urusan statistik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merekomendasikan agar hasil estimasi PDRB adh konstan dimutakhirkan secara periodik, dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5. Rekomendasi ini didukung pula oleh komitmen pimpinan BPS Negara-negara ASEAN di tahun 2000. Hal ini dilakukan agar besaran angka PDRB dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

<http://pesawarankab.bps.go.id>

BAB II

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Menurut *System of National Accounts (SNA)* yang diterbitkan oleh *United Nation*, secara makro perekonomian suatu wilayah menurut lapangan usaha terdiri dari 3 sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Lebih rinci lagi ketiga sektor tersebut dibagi menjadi 9 sektor, yang terdiri dari :

2.1. Pertanian

- 2.1.1. Tanaman bahan makanan
- 2.1.2. Tanaman perkebunan
- 2.1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya
- 2.1.4. Kehutanan
- 2.1.5. Perikanan

2.2. Pertambangan dan penggalian

- 2.2.1. Minyak dan gas bumi
- 2.2.2. Pertambangan tanpa migas
- 2.2.3. Penggalian

2.3. Industri pengolahan

- 2.3.1. Industri migas
 - 1) Pengolahan minyak bumi
 - 2) Gas alam cair
- 2.3.2. Industri tanpa migas

2.4. Listrik, gas kota dan air bersih

- 2.4.1. Listrik
- 2.4.2. Gas kota
- 2.4.3. Air bersih

- 2.5. Bangunan
- 2.6. Perdagangan, hotel dan restoran
 - 2.6.1. Perdagangan besar dan eceran
 - 2.6.2. Hotel
 - 2.6.3. Restoran/rumah makan
- 2.7. Pengangkutan dan komunikasi
 - 2.7.1. Pengangkutan
 - 1) Angkutan rel
 - 2) Angkutan jalan raya
 - 3) Angkutan laut
 - 4) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 5) Angkutan udara
 - 6) Jasa penunjang angkutan
 - 2.7.2. Komunikasi
 - 1) Pos dan telekomunikasi
 - 2) Jasa Penunjang Komunikasi
- 2.8. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - 2.8.1. Bank
 - 2.8.2. Lembaga keuangan tanpa bank
 - 2.8.3. Jasa penunjang keuangan
 - 2.8.4. Sewa bangunan
 - 2.8.5. Jasa perusahaan
- 2.9. Jasa – jasa
 - 2.9.1. Pemerintahan umum
 - 2.9.2. Swasta
 - 1) Sosial dan kemasyarakatan

- 2) Hiburan dan rekreasi
- 3) Perorangan dan rumah tangga

2.1. Sektor Pertanian

Kegiatan sektor pertanian mencakup segala perusahaan dan pemanfaatan benda/makhluk biologis (hidup) yang didapat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha lainnya, baik untuk sendiri maupun pihak lain. Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan, serta perburuan binatang liar.

Sektor pertanian ini meliputi beberapa sub sektor, yaitu : tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

2.1.1. Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan. Jenis tanaman pada sub sektor ini adalah : padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran serta tanaman hias.

Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah sektor ini dilakukan melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga masing-masing komoditi. Sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan melalui metode revaluasi.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penghitungan baik produksi maupun harga didapat dari Dinas Tanaman Pangan dan BPS. Usaha memperkirakan besarnya biaya produksi (*intermediate cost*) dan produksi ikutan/produksi sampingan umumnya menggunakan rasio yang diperoleh melalui survei khusus dan hasil Sensus Pertanian 2003. Adapun biaya penyusutan menggunakan rasio dalam penghitungan pendapatan regional Provinsi Lampung.

2.1.2. Tanaman Perkebunan

Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 Ha. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan, atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 Ha.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data

Data produksi bersumber dari Dinas Perkebunan dan perusahaan perkebunan PTP X Bandar Lampung. Data harga diperoleh dari sumber yang sama dan dilengkapi dengan data yang tersedia di BPS. Rasio biaya produksi dan produksi ikutan menggunakan rasio hasil survei khusus dan hasil Sensus Pertanian 2003.

2.1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub sektor ini meliputi usaha pemeliharaan segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas, baik bertujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong dan diambil dagingnya, maupun untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya. Produksi ternak adalah jumlah ternak lahir ditambah dengan pertambahan berat badan atau penggemukan dan hasil-hasil ternak lainnya, seperti telur, susu dan bulu. Akan tetapi data pertambahan berat badan atau penggemukan tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga di dalam memperkirakan produksi ternak dilakukan dengan cara : jumlah pematangan + populasi akhir tahun – populasi awal tahun + ekspor – impor.

Metode Estimasi

Perkiraan nilai produksi didapatkan dengan menggunakan pendekatan produksi, sedangkan nilai produksi atas dasar harga konstan 2000 dipakai metode revaluasi.

Sumber Data

Data pokok yang digunakan dalam mengestimasi penghitungan produksi ternak diperoleh dari Dinas Peternakan dan dilengkapi dengan data yang tersedia di BPS. Rasio biaya produksi dan penyusutan diperoleh melalui survei khusus (SKPR) dan hasil Sensus Pertanian 2003.

2.1.4. Kehutanan

Sub sektor ini meliputi usaha di areal hutan berupa penebangan kayu, pengambilan getah, daun, akar, dan kulit kayu, bambu, rotan, arang dan perburuan binatang hutan. Termasuk juga kayu dan bambu yang berasal dari areal non hutan, seperti yang ditanam petani di kebun atau di pekarangan rumah.

Metode Estimasi

Estimasi sub sektor ini dilakukan dengan pendekatan produksi, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode revaluasi.

Sumber Data

Data produksi maupun harga yang dipergunakan diperoleh dari Dinas Kehutanan. Biaya produksi dan penyusutan menggunakan rasio tetap terhadap output yang merupakan pengolahan hasil survei khusus.

2.1.5. Perikanan

Sub sektor ini meliputi segala bentuk perusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik di laut, di sungai, maupun di perairan air tawar, termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan nelayan atau rumah tangga.

Metode Estimasi

Perkiraan nilai produksi sub sektor ini dihitung melalui pendekatan produksi (*production approach*), sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan cara revaluasi.

Sumber Data

Data produksi dan harga bersumber dari Dinas Perikanan, biaya produksi didapatkan dari survei khusus, sedangkan penyusutan menggunakan rasio dalam penghitungan pendapatan regional Propinsi Lampung.

2.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang dan mineral serta barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas. Dalam penghitungan pendapatan regional Kabupaten Pesawaran sektor ini hanya mencakup kegiatan pertambangan emas, batu bara, dan penggalian batu-batuan, pasir, tanah liat, kerikil dan lain-lain.

Metode Estimasi

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam memperkirakan nilai produksi adalah pendekatan produksi, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan cara deflasi.

Sumber Data

Data yang dipergunakan bersumber dari Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi, Dinas Pertambangan dan hasil Sensus Ekonomi 2006.

2.3. Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi. Pembuatan dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun oleh rumah tangga.

Pengelompokan industri menurut kapasitas oleh Badan Pusat Statistik didasarkan oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan, sehingga industri dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Industri besar, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja lebih besar atau sama dengan 100 orang.
- b. Industri sedang, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.
- c. Industri kecil, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
- d. Industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Metode Estimasi

Penghitungan sektor ini dilakukan dengan pendekatan produksi, sedangkan perkiraan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi. Deflator yang dipakai untuk mendeflasi harga berlaku menggunakan IHPB sektor industri yang dibedakan menurut masing-masing kelompok/sub kelompok industri.

Sumber Data

Untuk keperluan estimasi nilai tambah sektor industri digunakan berbagai data antara lain Sensus Ekonomi 2006, survei tahunan industri besar sedang, dan survei industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR).

2.4. Sektor Listrik dan Air Bersih

Di Kabupaten Pesawaran sektor ini hanya meliputi kegiatan listrik dan air minum, karena sampai saat ini produksi gas kota belum ada di daerah Pesawaran.

2.4.1. Listrik

Sub sektor listrik meliputi pembangkit tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik, untuk dijual kepada konsumen baik oleh PLN maupun bukan PLN. Termasuk juga di sini listrik yang dibangkitkan sektor lain, seperti industri, jasa-jasa, yang dijual kepada pihak lain dan datanya dapat dipisahkan.

2.4.2. Air bersih

Meliputi usaha penampungan dan penjernihan air bersih serta pendistribusiannya kepada konsumen, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah daerah.

Metode Estimasi

Metode penghitungan sektor listrik dan air minum dilakukan melalui pendekatan produksi, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan cara ekstrapolasi.

Sumber Data

Data bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah IV Cabang Tanjung Karang, Perusahaan Daerah Air Minum dan badan-badan pengelola air minum yang ada di daerah Kabupaten Pesawaran serta survei lainnya yang dilaksanakan oleh BPS.

Input atau biaya untuk listrik menggunakan rasio dalam penghitungan pendapatan regional Propinsi Lampung, sedangkan air minum menggunakan hasil survei khusus.

2.5. B a n g u n a n

Sub sektor ini meliputi usaha pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, perombakan dari suatu bangunan atau konstruksi yang dimaksud dapat berupa; bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya. Termasuk juga kegiatan sub konstruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin, pemasangan saluran air dan sebagainya.

Dalam hal ini tercakup pula pembuatan dan perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, swasta, dan badan-badan pemerintah.

Metode Estimasi

Sektor ini estimasinya dilakukan melalui pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.

Sumber Data

Untuk penghitungan nilai tambah sektor ini datanya bersumber dari Sensus Ekonomi 2006, survei konstruksi tahunan, serta data lainnya yang diperoleh dari beberapa perusahaan.

2.6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

2.6.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Sub sektor perdagangan besar meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baik yang baru maupun bekas oleh pedagang, dari pihak produsen atau importir kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau konsumen tanpa merubah bentuk, dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan pembelian, dan penjualan kembali barang, umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, tanpa merubah bentuk, baik barang baru maupun barang bekas secara eceran.

2.6.2. Hotel

Sub sektor ini meliputi usaha penyediaan penginapan dan berbagai akomodasi lainnya seperti hotel, motel, losmen dan sebagainya, baik yang tersedia untuk umum ataupun hanya untuk anggota suatu organisasi tertentu atas dasar suatu pembayaran. Termasuk pula di sini kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya, yang berada dalam suatu satuan usaha dengan penginapan tersebut, dan datanya sulit dipisahkan.

2.6.3. Restoran / Rumah Makan

Sub sektor ini meliputi usaha restoran / rumah makan, katering, restoran di kereta api, cafetaria dan kantin. Termasuk usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya dimakan langsung di tempat penjualan seperti warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya.

Metode Estimasi

Untuk penghitungan sub sektor perdagangan besar dan eceran dilakukan melalui pendekatan arus barang (*commodity flow*) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Estimasi dilakukan dengan menggunakan rasio margin terhadap nilai

produksi daerah sendiri (pertanian, pertambangan dan penggalian, industri) dan impor, termasuk barang masuk antar daerah.

Sub sektor restoran/rumah makan, perhotelan/penginapan dihitung dengan pendekatan produksi, sedangkan harga konstan diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

Sumber Data

Untuk penghitungan nilai tambah ke tiga sub sektor tersebut, datanya bersumber dari Sensus Penduduk 2000, Sensus Ekonomi 2006, laporan bulanan perhotelan/losmen, publikasi statistik ekspor dan impor Badan Pusat Statistik, harga perdagangan besar (HPB) dan juga data dari survei lainnya yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

2.7. Pengangkutan dan Komunikasi

2.7.1. Pengangkutan

Kegiatan sektor ini meliputi pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak bermotor atas dasar suatu pembayaran. Termasuk jasa angkutan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan tersebut beserta penyediaan fasilitas-fasilitasnya.

1. Pengangkutan Rel

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan alat angkut kereta api.

2. Pengangkutan Jalan Raya

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor (truk, bus, oplet, taksi, ojek motor), maupun tidak bermotor (becak, pedati, gerobak).

3. Pengangkutan Laut

Meliputi pelayaran samudera dan perairan pantai menggunakan kapal laut, yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran baik yang beroperasi di dalam maupun di luar daerah ataupun di luar negeri. Termasuk juga kegiatan jasa penunjang angkutan laut seperti

pelabuhan laut/sungai, jasa pemanduan, bongkar muat, pergudangan, ekspedisi dan keagenan serta kegiatan angkutan sungai dan angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ferry.

4. Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang, dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai baik bermotor, maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut ferry.

5. Pengangkutan Udara

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui udara dengan menggunakan pesawat udara/kapal terbang yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, baik penerbangannya dilakukan secara teratur maupun tidak.

6. Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan laut, bongkar muat, keagenan penumpang, ekspedisi laut dan jasa penunjang lainnya.

2.7.2. Komunikasi

Sektor ini terdiri dari sub sektor Pos dan Telekomunikasi, dan sub sektor Jasa Penunjang Komunikasi.

1. Pos dan Telekomunikasi

Sub sektor ini meliputi kegiatan pelayanan jasa komunikasi untuk umum yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pos Indonesia dan PT. (Persero) Telkom. Kegiatan pos yaitu pemberian jasa kepada pihak lain seperti pengiriman surat, paket dan wesel. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa seperti pengiriman berita dengan menggunakan telepon, teleks dan telegraph.

2. Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan ini mencakup kegiatan lain yang menunjang kegiatan Telkom dan Pos dan Giro yang belum tercakup di atas, kegiatan tersebut berupa usaha perantara/penghubung

antara produsen dan konsumen pemakai jasa pos dan telekomunikasi seperti wartel, warpostel dan jasa titipan.

Metode Estimasi

Sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi untuk kegiatan pengangkutan dan metode alokasi untuk kegiatan komunikasi.

Sumber Data

Penghitungan nilai tambah sektor ini datanya bersumber dari Perumka Inspeksi 12 Tanjung Karang, DLLAJ, PT. (Persero) ASDP Bakauheni, Bandar Udara Branti, Kantor Perwakilan Garuda Indonesia Airways, PT. Merpati Nusantara Airways, Kantor Daerah Telepon dan Telegrap Tanjung Karang, Kantor Pos dan Giro serta data yang tersedia di Badan Pusat Statistik.

2.8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

2.8.1. Bank

Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak lain, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, transfer/memindahkan rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank, menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga dan sebagainya.

2.8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank

Kegiatan ini meliputi kegiatan pelayanan asuransi, koperasi simpan pinjam, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit). Dalam penghitungan pendapatan regional Kabupaten Pesawaran, kegiatan ini hanya mencakup asuransi, koperasi simpan pinjam dan pegadaian.

1. Asuransi

Sub sektor ini meliputi kegiatan pelayanan asuransi, baik asuransi jiwa maupun bukan jiwa, seperti kebakaran, kecelakaan, kerusakan, dan sebagainya. Termasuk juga agen

perasuransian, jasa pelayanan penanggung perasuransian, pengatur dana pensiun yang berdiri sendiri, dan sebagainya.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pegadaian

Meliputi jasa pelayanan bidang keuangan seperti yang dilakukan pada usaha koperasi simpan pinjam dan pegadaian.

2.8.3. Sewa Bangunan

Sektor ini meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah tangga, tanpa memperhatikan apakah rumah tersebut benar-benar disewa atau tidak, seperti rumah milik sendiri, rumah instansi pemerintah ataupun rumah instansi/perusahaan swasta lainnya.

2.8.4. Jasa Perusahaan

Sub sektor ini meliputi kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan tabulasi, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan, jasa persewaan mesin dan peralatan.

Metode Estimasi

Penghitungan sektor ini dilakukan melalui pendekatan produksi, sedangkan atas dasar harga konstan 2000, bank, asuransi, dan sewa bangunan dilakukan melalui cara deflasi. Untuk koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan jasa perusahaan estimasi dilakukan melalui cara ekstrapolasi.

Sumber Data

Dalam mengestimasi nilai tambah sektor ini, data bersumber dari Bank Indonesia, Kanwil Koperasi, Kanwil Pekerjaan Umum, Pengadilan Negeri, perusahaan asuransi, Perum Pegadaian, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan data lainnya baik yang diterima dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun dari survei khusus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Propinsi.

2.9. Jasa – jasa

2.9.1. Pemerintahan Umum

Sektor ini mencakup kegiatan pemerintahan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, misalnya dalam mengatur negara. Kegiatan pemerintahan sebagian besar hasilnya digunakan oleh pemerintah sendiri sebagai konsumen akhir. Kegiatan pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa serta unit-unitnya yang berada di Kabupaten Pesawaran. Termasuk juga kegiatan pertahanan dan keamanan negara/daerah.

2.9.2. S w a s t a

Meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta perorangan dan rumah tangga.

1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Sub sektor ini meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa sosial dan kemasyarakatan yang diusahakan oleh swasta seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan lainnya.

Jasa pendidikan mencakup semua kegiatan pendidikan swasta mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, termasuk guru perorangan yang berusaha sendiri dan kursus-kursus.

Jasa kesehatan meliputi semua kegiatan pada lembaga kesehatan swasta yang berbentuk rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, dan sebagainya. Termasuk juga pelayanan kesehatan atas usaha sendiri seperti praktek dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter hewan, psikiater, bidan, tukang gigi, dukun bayi, tabib dan sebagainya.

Jasa Sosial dan kemasyarakatan lainnya mencakup kegiatan panti asuhan, panti wreda, yayasan penderita anak cacat, rumah ibadah, dan lain sebagainya.

Dalam publikasi ini kegiatan yang dilakukan jasa sosial dan kemasyarakatan hanya terbatas pada kegiatan jasa pendidikan swasta yang terdiri dari taman kanak-kanan sampai

dengan perguruan tinggi dan kursus-kursus. Jasa kesehatan hanya terbatas pada kegiatan rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin swasta, dokter-dokter praktek umum, mantri praktek, bidan praktek, laboratorium klinik, dukun dan pengobatan tradisional lainnya. Sedangkan dari jasa kemasyarakatan hanya panti asuhan dan rumah ibadah.

2. Jasa Hiburan dan Rekreasi

Sub sektor ini meliputi usaha/kegiatan penyediaan dan pengelolaan berbagai jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat baik perorangan maupun rumah tangga, yang berorientasi mencari keuntungan (*profit making*). Kegiatan tersebut seperti pembuatan dan distribusi film, usaha pemutaran film, penyiaran radio swasta, produksi dan pertunjukan sandiwara, tari, sanggar dan musik. Termasuk juga rekreasi lainnya gelanggang pacuan, sirkus, taman hiburan dan klub malam, pengubahan lagu, penulis buku, pembuat lukisan, dan sebagainya.

Dari berbagai kegiatan tersebut di atas hanya pemutaran film (bioskop), penyiaran radio swasta niaga dan taman hiburan/tempat rekreasi yang dapat diestimasi nilai tambahnya.

3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Sub sektor ini meliputi kegiatan/usaha penyelenggaraan jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumah tangga seperti : reparasi, binatu, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumah tangga dan jasa perorangan lainnya. Mengingat keterbatasan data maka dalam perhitungan ini hanya terbatas pada kegiatan jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang jahit, tukang cukur, perawatan kulit, perawatan muka dan rambut.

Metode Estimasi

Sub sektor pemerintahan umum dihitung berdasarkan pendekatan pendapatan untuk Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan dilakukan melalui cara tidak langsung yaitu alokasi dari angka nasional. Sedangkan jasa swasta seperti sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta perorangan dan rumah tangga dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan produksi.

Untuk memperkirakan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi untuk sub sektor jasa pemerintahan umum, sosial kemasyarakatan, serta

hiburan dan rekreasi. Sedangkan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga dengan menggunakan cara deflasi.

Sumber Data

Untuk memperkirakan nilai tambah sektor ini data bersumber dari Kantor Tata Usaha Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, Pemerintah Desa, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Kanwil Departemen Agama, Perguruan Tinggi Swasta, Kanwil/Dinas Kesehatan, Kanwil/Dinas Sosial, Kanwil Departemen Penerangan, data Susenas, dan data dari survei khusus. Rasio input diperoleh melalui hasil pengolahan survei khusus pada masing-masing jenis kegiatan.

BAB III

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN 2007 - 2011

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten ke-11 yang berada di Provinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tertanggal 10 Agustus 2007. Setelah lima tahun terpisah dari Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan kabupaten induknya, perekonomian Kabupaten Pesawaran menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari besarnya kenaikan PDRB baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan selama periode 2007-2011. PDRB per kapita Kabupaten Pesawaran selama periode tersebut juga mengalami peningkatan.

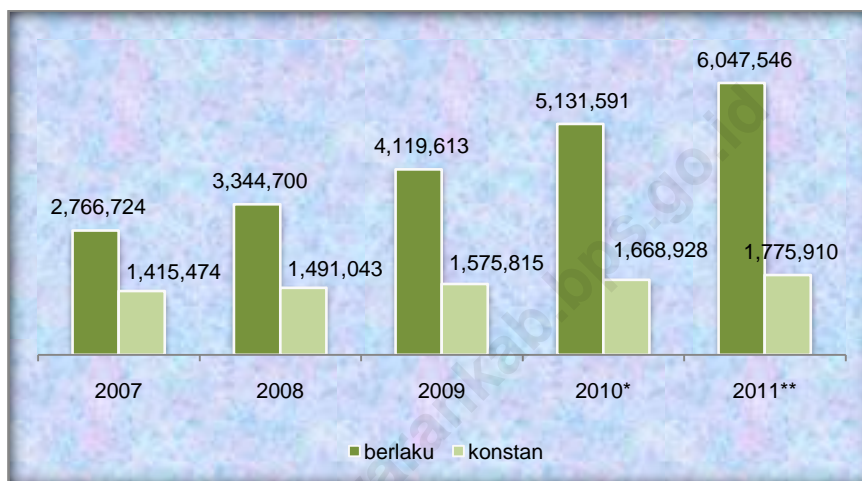
Pada tahun 2007 nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 2,7 trilyun rupiah meningkat menjadi 6,04 trilyun rupiah di tahun 2011. Hal ini berarti selama periode tahun 2007-2011 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 820 milyar rupiah per tahun. Peningkatan juga terjadi pada nilai nominal PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2007 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 1,4 trilyun rupiah, kemudian meningkat menjadi 1,8 trilyun rupiah di tahun 2011. Dengan kata lain, terjadi peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan rata-rata sebesar 90 milyar rupiah per tahun selama periode tahun 2007-2011.

Perkembangan nilai PDRB ini dari tahun ke tahun disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan, dan perubahan dalam tingkat harganya. Dengan melihat distribusi nilai PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing sektor terhadap nilai total PDRB pada tahun yang bersangkutan, akan nampak struktur perekonomian suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan terlihat melalui perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Perkembangan nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi atau perkembangan

produktivitas secara nyata. Perubahan harga telah dihilangkan dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 3.1.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100)
Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)**



* Angka diperbaiki
** Angka Sementara

3.1. Struktur Ekonomi

Analisis mengenai struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan melihat besarnya persentase distribusi masing-masing sektor terhadap nilai total PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi masing-masing sektor. Dengan demikian dapat dikatehui sektor-sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Pesawaran.

Selama periode 2007-2011, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Pesawaran. Apabila dibandingkan dengan nilai PDRB adhb sektor pertanian, terlihat bahwa selama periode ini nilai PDRB adhb sektor pertanian mengalami peningkatan,

akan tetapi sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pesawaran selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya sektor-sektor selain sektor pertanian yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian.

Tabel 3.1.1.

Sumbangan Setiap Sektor Ekonomi Terhadap Perekonomian Kabupaten Pesawaran Tahun 2007-2011 (Persen)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian	50,57	50,56	50,09	49,95	49,70
2 Pertambangan & Penggalian	0,28	0,27	0,24	0,22	0,21
3 Industri Pengolahan	12,65	12,66	13,55	13,68	13,87
4 Listrik dan Air Bersih	0,18	0,18	0,16	0,16	0,15
5 Bangunan	9,13	8,56	8,03	7,36	6,98
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	14,15	14,26	14,90	15,99	16,40
7 Pengangkutan & Komunikasi	1,76	1,81	1,90	2,04	2,10
8 Keuangan, Persewaan & Js. Prsh	0,83	0,88	0,92	0,97	1,05
9 Jasa-jasa	10,45	10,82	10,20	9,64	9,54

* Angka diperbaiki

** Angka Sementara

Pada tahun 2007 nilai PDRB sektor pertanian adalah sebesar 1,4 trilyun rupiah atau 50,57 persen diciptakan dari sektor ini. Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,0 trilyun rupiah, namun sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian mengalami penurunan menjadi sebesar 49,70 persen.

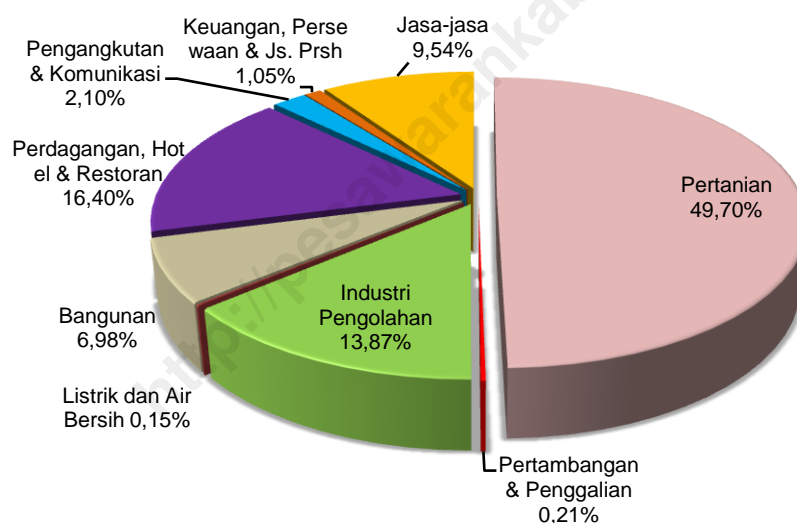
Sektor dengan sumbangan terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Berbeda dengan sektor pertanian, selama periode 2007-2011 sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap perekonomian Kabupaten Pesawaran selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 sumbangan sebesar 14,15 persen diberikan oleh sektor ini dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar

16,40 persen di tahun 2011. Nilai PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi sebesar 992 milyar rupiah.

Sektor industri pengolahan adalah sektor dengan sumbangan terbesar ketiga. Selama periode 2007-2011 sumbangan sektor industri pengolahan selalu mengalami peningkatan. Nilai PDRB sebesar 350 milyar rupiah diciptakan dari sektor ini pada tahun 2007 dan memberikan sumbangan sebesar 12,65 persen terhadap perekonomian Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2011 sumbangan sebesar 13,87 persen diciptakan dari sektor ini dengan nilai PDRB sebesar 839 milyar rupiah.

Gambar 3.1.1.

Struktur Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2011



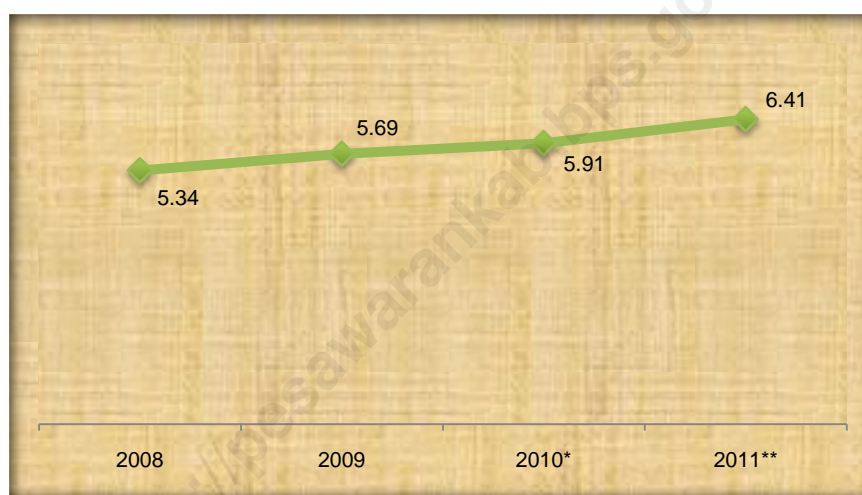
3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Analisis pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan pada tahun dasar.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah pada periode waktu tertentu. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi tentunya dengan memperhatikan peran pertumbuhan sektor terhadap pertumbuhan PDRB.

Gambar 3.2.1.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran
Tahun 2008-2011 (persen)**



* Angka diperbaiki
** Angka Sementara

Dalam publikasi ini analisis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran dilakukan mulai tahun 2008 hingga tahun 2011. Perekonomian Kabupaten Pesawaran tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran meningkat menjadi 6,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Pesawaran tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yakni sebesar 16,45 persen. Sub sektor persewaan dengan pertumbuhan sebesar 18,61 persen merupakan sub sektor dengan pertumbuhan tertinggi di sektor ini. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,99 persen. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan tertinggi ketiga adalah sektor jasa-jasa

dengan nilai pertumbuhan sebesar 7,89 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada setiap sektor ekonomi di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor
di Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2011 (Persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian	3,74	4,56	4,18	4,97
2 Pertambangan & Penggalian	(3,60)	2,36	2,18	2,33
3 Industri Pengolahan	9,09	7,61	8,29	7,56
4 Listrik dan Air Bersih	4,72	2,26	4,11	3,27
5 Bangunan	4,52	2,48	3,13	3,99
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	7,41	7,19	8,39	8,47
7 Pengangkutan & Komunikasi	9,58	10,17	10,58	9,99
8 Keuangan, Persewaan & Js. Prsh	9,22	12,63	15,78	16,45
9 Jasa-jasa	5,77	7,68	7,89	8,73
Pesawaran	5,34	5,69	5,91	6,41

* Angka diperbaiki

** Angka Sementara

Meskipun pertumbuhan suatu sektor cukup tinggi, namun apabila kontribusinya terhadap nilai total PDRB masih kecil, maka peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten juga relatif kecil. Untuk mengetahui peranan masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, disajikan dalam tabel berikut.

Dari tabel 3.2.2. nampak bahwa pada tahun 2011 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki peranan sebesar 0,21 persen, padahal sektor ini merupakan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Pesawaran. Di tahun yang sama, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga hanya memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Pesawaran sebesar 1,05 persen. Hal ini berarti bahwa walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, bukan berarti sektor ini yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.

Tabel 3.2.2.

Peran Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 (persen)

Lapangan Usaha		2011**
(1)		(2)
1	Pertanian	2,56
2	Pertambangan & Penggalian	0,01
3	Industri Pengolahan	0,96
4	Listrik dan Air Bersih	0,00
5	Bangunan	0,25
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,46
7	Pengangkutan & Komunikasi	0,24
8	Keuangan, Persewaan & Js. Perusahaan	0,21
9	Jasa-jasa	0,73

** Angka Sementara

Sektor pertanian dengan peranan sebesar 2,56 persen merupakan sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97 persen dan sumbangan sektor pertanian sebesar 49,70 persen, sektor ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011 menjadi sebesar 6,41 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen merupakan sub sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan produksi padi di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011.

3.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator yang cukup relevan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah dengan melihat besarnya PDRB per kapita yang diterima oleh masyarakat atau penduduk daerah tersebut. Dengan melihat PDRB per kapita atas dasar

harga konstan (ADHK), dapat diketahui besarnya pendapatan riil yang diperoleh individu pada tahun yang bersangkutan. Meskipun angka per kapita ini bersifat global tanpa melihat apakah nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu, namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007–2011 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, nilai PDRB perkapita adalah sebesar 7,24 juta rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,64 juta rupiah pada tahun 2008. Dengan kata lain terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 19,33 persen. Tahun 2009 nilai PDRB per kapita meningkat sebesar 21,58 persen menjadi 10,50 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menjadi 12,87 juta rupiah atau meningkat sebesar 22,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Pesawaran kembali mengalami peningkatan sebesar 16,58 persen menjadi 14,99 juta rupiah. Selama periode 2007-2011 nilai PDRB per kapita adhb Kabupaten Pesawaran rata-rata mengalami peningkatan sebesar 26,79 persen atau sebesar 1,94 juta rupiah per tahun.

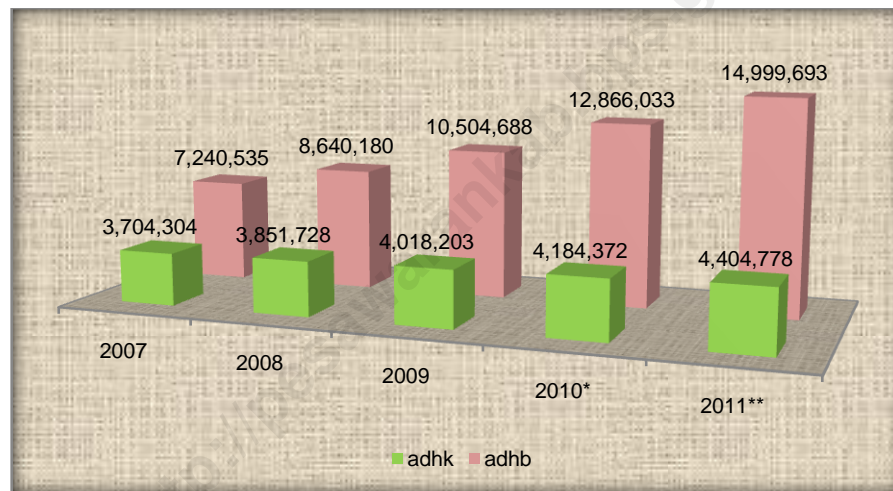
Adanya peningkatan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 - 2011 keadaan perekonomian di Kabupaten Pesawaran lebih baik dari tahun sebelumnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran pun mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun yang perlu juga menjadi perhatian adalah seberapa besar perubahan harga yang terjadi. Karena kenaikan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang tinggi akan menjadi kurang berarti jika disertai dengan perubahan harga yang tinggi pula.

Untuk mengetahui PDRB per kapita secara riil adalah dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga atau disebut dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan masyarakat Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 adalah sebesar 3,70 juta rupiah. Pada tahun 2008 nilai ini mengalami peningkatan

sebesar 3,98 persen atau menjadi sebesar 3,85 juta rupiah. Pada tahun 2009 nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 4,01 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,32 persen. Kemudian pada tahun 2010 menjadi 4,18 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2011 PDRB per kapita adhk Kabupaten Pesawaran kembali meningkat sebesar 5,27 persen menjadi 4,40 juta rupiah.

Gambar 3.3.1.

**PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100)
Tahun 2007-2011 (Rupiah)**



* Angka diperbaiki
** Angka Sementara

BAB IV

PERBANDINGAN DENGAN KAB/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

Pada bab ini akan disajikan perbandingan keadaan ekonomi Kabupaten Pesawaran terhadap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung terdiri dari empat belas kabupaten/kota. Beberapa ukuran ekonomi yang akan dibandingkan adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, besaran laju pertumbuhan ekonomi, dan besaran PDRB per kapita antar kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terdiri dari empat belas kabupaten/kota. Jika ditinjau dari segi nilai PDRB dan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Lampung, maka Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011 memberikan sumbangan terbesar ke-7 dari 14 kab/kota yang ada di Lampung. Sumbangan sebesar 17,38 persen yang merupakan sumbangan PDRB terbesar diberikan oleh Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2011 nilai PDRB adhb Provinsi Lampung sebesar 128,4 trilyun rupiah, PDRB adhb Kota Bandar Lampung sebesar 22,3 trilyun rupiah. Sedangkan sumbangan PDRB Kabupaten Pesawaran terhadap PDRB Lampung pada tahun 2011 sebesar 4,71 persen, sedikit berkurang dibandingkan tahun 2010 dengan sumbangan sebesar 4,73 persen.

Kabupaten dengan sumbangan terbesar kedua terhadap PDRB Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2011, nilai PDRB adhb Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 19,4 trilyun rupiah. Sumbangan sebesar 15,07 persen terhadap PDRB Lampung diberikan oleh Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Timur dengan sumbangan sebesar 9,30 persen merupakan kabupaten dengan sumbangan nilai PDRB terbesar ketiga terhadap PDRB Lampung. Pada tahun 2011, nilai PDRB adhb Kabupaten Lampung Timur sebesar 11,9 trilyun rupiah.

Tabel. 4.1.1.

**Perbandingan Nilai dan Sumbangan PDRB adhb
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2010-2011**

No.	Kabupaten/Kota	PDRB adhb (Juta Rupiah)		Sumbangan PDRB adhb terhadap Provinsi Lampung (%)	
		2010 [*]	2011 ^{**}	2010 [*]	2011 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lampung Barat	2.825.937	3.380.542	2,61	2,63
2.	Tanggamus	4.817.706	5.579.640	4,45	4,35
3.	Lampung Selatan	10.213.365	11.255.337	9,42	8,77
4.	Lampung Timur	10.524.809	11.940.095	9,71	9,30
5.	Lampung Tengah	16.650.401	19.356.718	15,36	15,07
6.	Lampung Utara	8.150.694	10.444.595	7,52	8,13
7.	Way Kanan	3.000.463	3.461.124	2,77	2,70
8.	Tulang Bawang	5.677.662	6.501.225	5,24	5,06
9.	Pesawaran	5.131.591	6.047.546	4,73	4,71
10.	Pringsewu	2.963.315	3.313.305	2,73	2,58
11.	Tulang Bawang Barat	3.219.379	3.968.804	2,97	3,09
12.	Mesuji	2.943.052	3.237.133	2,72	2,52
13.	Bandar Lampung	19.437.165	22.311.918	17,93	17,38
14.	Metro	1.168.320	1.319.875	1,08	1,03
Lampung		108.378.507	128.408.895	100,00	100,00

* Angka diperbaiki

** Angka Sementara

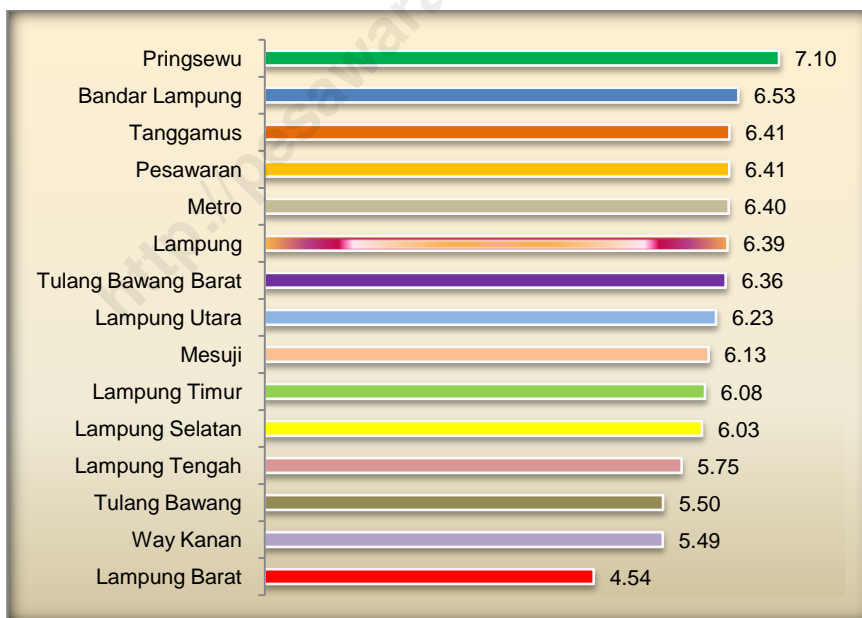
4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pada tahun 2011, semua kabupaten/kota yang ada di Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi. Secara umum pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sekitar 4 sampai 7 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 6,39 persen. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun ini. Pada tahun 2011 Kabupaten Pringsewu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10 persen.

Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua pada tahun 2011 adalah Kota Bandar Lampung. Pada tahun ini, Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,53 persen. Sedangkan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus tahun 2011 sebesar 6,41 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi ini membuat kedua kabupaten tersebut berada di urutan ke tiga kabupaten dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Lampung pada tahun 2011. Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat di tahun ini hanya mencapai 4,54 persen.

Gambar 4.2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 (Persen)



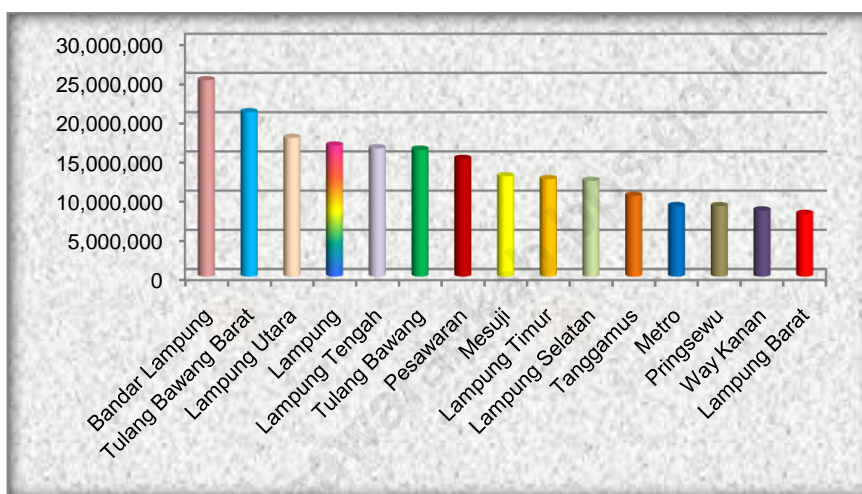
4.3. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Peningkatan nilai PDRB per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar 16,58 persen pada tahun 2011 dengan nilai nominal yang mencapai 14,9 juta rupiah mencerminkan bahwa secara makro telah terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2011, Provinsi Lampung telah memiliki 14 kabupaten/kotamadya. Perbandingan nilai PDRB per kapita seluruh kabupaten/kotamadya se-provinsi Lampung disajikan di dalam gambar berikut.

Gambar 4.3.1.

**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 (Rupiah)**



Pada tahun 2011, Kota Bandar Lampung memiliki PDRB per kapita tertinggi yakni sebesar 25 juta rupiah. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi kedua yakni sebesar 20,9 juta rupiah. PDRB per kapita tertinggi ketiga dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara sebesar 14,7 juta rupiah, keempat Kabupaten Lampung Tengah sebesar 16,4 juta rupiah, dan kelima Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai PDRB per kapita sebesar 16,1 juta rupiah. Adapun Kabupaten Pesawaran berada pada urutan keenam dengan nilai PDRB per kapita sebesar 14,9 juta rupiah. Dengan melihat data PDRB per kapita ini dapat diketahui secara makro bahwa meskipun tidak terlalu tinggi namun rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran sedikit lebih baik dibandingkan dengan 8 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Tabel 4.3.1.

**PDRB Per Kapita adhb Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung tahun 2011**

No	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita adhb (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Lampung Barat	7.980.769
2.	Tanggamus	10.286.208
3.	Lampung Selatan	12.202.270
4.	Lampung Timur	12.412.116
5.	Lampung Tengah	16.356.495
6.	Lampung Utara	17.684.121
7.	Way Kanan	8.430.826
8.	Tulang Bawang	16.163.114
9.	Pesawaran	14.999.693
10.	Pringsewu	8.970.978
11.	Tulang Bawang Barat	20.949.970
12.	Mesuji	12.773.334
13.	Bandar Lampung	25.030.927
14.	Metro	8.975.691
	Lampung	16.695.979

TABEL-TABEL

<http://pesawarankelompok.go.id>

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011
(JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	1.399.096	1.691.214	2.063.691	2.563.050	3.005.594
a. Tanaman Bahan Makanan	550.860	664.362	810.505	1.005.227	1.180.693
b. Tanaman Perkebunan	173.465	219.602	281.585	354.201	422.218
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	119.577	137.544	165.203	205.301	231.860
d. Kehutanan	8.632	9.580	11.145	13.169	14.635
e. Perikanan	546.562	660.125	795.253	985.152	1.156.188
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7.701	8.933	10.077	11.344	12.830
a. Pertambangan Tanpa Migas	309	396	477	546	623
b. Penggalian	7.392	8.536	9.599	10.798	12.206
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	349.989	423.549	558.247	701.868	838.924
4. LISTRIK & AIR BERSIH	4.939	5.876	6.750	7.999	8.843
a. Listrik	4.889	5.817	6.677	7.915	8.751
b. Air Bersih	50	59	72	84	93
5. BANGUNAN	252.614	286.396	330.902	377.659	422.299
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	391.605	477.115	613.652	820.503	991.962
a. Perdagangan Besar dan Eceran	377.029	457.793	590.124	789.133	953.745
b. Hotel	0	0	0	0	0
c. Restoran/rumah makan	14.576	19.323	23.528	31.370	38.217
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	48.571	60.450	78.235	104.745	126.948
a. Pengangkutan	40.938	51.313	66.931	89.923	106.299
1). Angkutan Rel	0	0	0	0	0
2). Angkutan Jalan Raya	39.735	49.842	65.202	87.837	103.878
3). Angkutan Penyeberangan	615	676	754	840	934
4). Angkutan Udara	0	0	0	0	0
5). Jasa penunjang Angkutan	588	794	975	1.246	1.487
b. Komunikasi	7.633	9.138	11.304	14.822	20.649
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	22.950	29.434	37.949	49.569	63.273
a. Bank	2.200	2.935	3.905	4.805	5.617
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1.068	1.270	1.447	1.651	1.918
c. Persewaan	19.486	25.007	32.340	42.810	55.392
d. Jasa Perusahaan	196	221	257	304	347
9. JASA-JASA	289.259	361.735	420.111	494.854	576.873
a. Pemerintahan Umum	250.231	316.462	364.330	423.685	490.160
b. Swasta	39.028	45.273	55.782	71.169	86.713
1). Sosial Kemasyarakatan	17.256	19.697	24.522	32.717	40.557
2). Hiburan dan Rekreasi	4.528	6.006	8.373	11.873	14.918
3). Perorangan dan Rumahtangga	17.243	19.570	22.886	26.579	31.238
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.766.724	3.344.700	4.119.613	5.131.591	6.047.546

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011
(JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	760.523	788.958	824.952	859.403	902.113
a. Tanaman Bahan Makanan	311.622	325.609	344.382	363.520	385.771
b. Tanaman Perkebunan	118.180	124.394	130.685	137.858	142.114
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	60.996	61.687	62.315	63.666	65.908
d. Kehutanan	4.909	4.866	4.975	4.929	5.060
e. Perikanan	264.817	272.401	282.596	289.430	303.261
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4.597	4.432	4.536	4.635	4.743
a. Pertambangan Tanpa Migas	167	214	254	276	297
b. Penggalian	4.430	4.218	4.283	4.359	4.446
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	166.009	181.107	194.895	211.059	227.015
4. LISTRIK & AIR BERSIH	1.775	1.859	1.901	1.979	2.044
a. Listrik	1.740	1.823	1.863	1.941	2.006
b. Air Bersih	35	36	38	37	37
5. BANGUNAN	93.858	98.101	100.533	103.676	107.809
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	229.916	246.957	264.708	286.913	311.201
a. Perdagangan Besar dan Eceran	219.529	236.226	253.386	274.772	298.408
b. Hotel	0	0	0	0	0
c. Restoran/rumah makan	10.388	10.731	11.322	12.142	12.793
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	30.177	33.067	36.428	40.284	44.307
a. Pengangkutan	26.624	28.901	31.503	34.357	37.246
1). Angkutan Rel	0	0	0	0	0
2). Angkutan Jalan Raya	25.997	28.246	30.826	33.649	36.510
3). Angkutan Penyeberangan	213	225	236	250	264
4). Angkutan Udara	0	0	0	0	0
5). Jasa penunjang Angkutan	414	430	441	457	473
b. Komunikasi	3.554	4.167	4.925	5.927	7.060
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	14.993	16.376	18.445	21.355	24.867
a. Bank	2.042	2.576	2.924	3.368	3.648
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	580	653	697	752	794
c. Persewaan	12.259	13.027	14.700	17.103	20.285
d. Jasa Perusahaan	112	119	124	133	140
9. JASA-JASA	113.626	120.187	129.417	139.625	151.812
a. Pemerintahan Umum	90.071	93.927	98.658	103.398	109.219
b. Swasta	23.554	26.260	30.758	36.228	42.593
1). Sosial Masyarakat	12.403	13.853	16.496	20.018	24.001
2). Hiburan dan Rekreasi	1.750	1.950	2.379	2.643	3.117
3). Perorangan dan Rumahtangga	9.402	10.458	11.883	13.567	15.474
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.415.474	1.491.043	1.575.815	1.668.928	1.775.910

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA
BERLAKU TAHUN 2007-2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	50,57	50,56	50,09	49,95	49,70
a. Tanaman Bahan Makanan	19,91	19,86	19,67	19,59	19,52
b. Tanaman Perkebunan	6,27	6,57	6,84	6,90	6,98
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,32	4,11	4,01	4,00	3,83
d. Kehutanan	0,31	0,29	0,27	0,26	0,24
e. Perikanan	19,75	19,74	19,30	19,20	19,12
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,28	0,27	0,24	0,22	0,21
a. Pertambangan Tanpa Migas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b. Penggalian	0,27	0,26	0,23	0,21	0,20
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	12,65	12,66	13,55	13,68	13,87
4. LISTRIK & AIR BERSIH	0,18	0,18	0,16	0,16	0,15
a. Listrik	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
b. Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BANGUNAN	9,13	8,56	8,03	7,36	6,98
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	14,15	14,26	14,90	15,99	16,40
a. Perdagangan Besar dan Eceran	13,63	13,69	14,32	15,38	15,77
b. Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Restoran/rumah makan	0,53	0,58	0,57	0,61	0,63
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,76	1,81	1,90	2,04	2,10
a. Pengangkutan	1,48	1,53	1,62	1,75	1,76
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,44	1,49	1,58	1,71	1,72
3). Angkutan Penyeberangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4). Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Jasa penunjang Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
b. Komunikasi	0,28	0,27	0,27	0,29	0,34
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	0,83	0,88	0,92	0,97	1,05
a. Bank	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
c. Persewaan	0,70	0,75	0,79	0,83	0,92
d. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9. JASA-JASA	10,45	10,82	10,20	9,64	9,54
a. Pemerintahan Umum	9,04	9,46	8,84	8,26	8,11
b. Swasta	1,41	1,35	1,35	1,39	1,43
1). Sosial Masyarakat	0,62	0,59	0,60	0,64	0,67
2). Hiburan dan Rekreasi	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25
3). Perorangan dan Rumahtangga	0,62	0,59	0,56	0,52	0,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka diperbaiki

^{**)} Angka sementara

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	53,73	52,91	52,35	51,49	50,80
a. Tanaman Bahan Makanan	22,02	21,84	21,85	21,78	21,72
b. Tanaman Perkebunan	8,35	8,34	8,29	8,26	8,00
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,31	4,14	3,95	3,81	3,71
d. Kehutanan	0,35	0,33	0,32	0,30	0,28
e. Perikanan	18,71	18,27	17,93	17,34	17,08
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27
a. Pertambangan Tanpa Migas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
b. Penggalian	0,31	0,28	0,27	0,26	0,25
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	11,73	12,15	12,37	12,65	12,78
4. LISTRIK & AIR BERSIH	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
a. Listrik	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
b. Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BANGUNAN	6,63	6,58	6,38	6,21	6,07
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	16,24	16,56	16,80	17,19	17,52
a. Perdagangan Besar dan Eceran	15,51	15,84	16,08	16,46	16,80
b. Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Restoran/rumah makan	0,73	0,72	0,72	0,73	0,72
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,13	2,22	2,31	2,41	2,49
a. Pengangkutan	1,88	1,94	2,00	2,06	2,10
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,84	1,89	1,96	2,02	2,06
3). Angkutan Penyeberangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
4). Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Jasa penunjang Angkutan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
b. Komunikasi	0,25	0,28	0,31	0,36	0,40
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	1,06	1,10	1,17	1,28	1,40
a. Bank	0,14	0,17	0,19	0,20	0,21
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
c. Persewaan	0,87	0,87	0,93	1,02	1,14
d. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9. JASA-JASA	8,03	8,06	8,21	8,37	8,55
a. Pemerintahan Umum	6,36	6,30	6,26	6,20	6,15
b. Swasta	1,66	1,76	1,95	2,17	2,40
1). Sosial Kemasyarakatan	0,88	0,93	1,05	1,20	1,35
2). Hiburan dan Rekreasi	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18
3). Perorangan dan Rumahtangga	0,66	0,70	0,75	0,81	0,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 5. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2011 (PERSEN))

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. P E R T A N I A N	20,88	22,02	24,20	17,27
a. Tanaman Bahan Makanan	20,60	22,00	24,02	17,46
b. Tanaman Perkebunan	26,60	28,23	25,79	19,20
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	15,03	20,11	24,27	12,94
d. Kehutanan	10,98	16,33	18,16	11,13
e. Perikanan	20,78	20,47	23,88	17,36
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	15,99	12,81	12,58	13,10
a. Pertambangan Tanpa Migas	28,16	20,39	14,49	14,09
b. Penggalian	15,48	12,46	12,48	13,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	21,02	31,80	25,73	19,53
4. LISTRIK & AIR BERSIH	18,97	14,87	18,50	10,56
a. Listrik	18,97	14,79	18,53	10,56
b. Air Bersih	18,90	22,69	16,12	10,47
5. BANGUNAN	13,37	15,54	14,13	11,82
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	21,84	28,62	33,71	20,90
a. Perdagangan Besar dan Eceran	21,42	28,91	33,72	20,86
b. Hotel	-	-	-	-
c. Restoran/rumah makan	32,57	21,76	33,33	21,82
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	24,46	29,42	33,89	21,20
a. Pengangkutan	25,34	30,44	34,35	18,21
1). Angkutan Rel				
2). Angkutan Jalan Raya	25,44	30,82	34,72	18,26
3). Angkutan Penyeberangan	10,00	11,51	11,44	11,11
4). Angkutan Udara	-	-	-	-
5). Jasa penunjang Angkutan	35,00	22,85	27,73	19,38
b. Komunikasi	19,72	23,70	31,12	39,31
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	28,25	28,93	30,62	27,65
a. B a n k	33,43	33,04	23,06	16,89
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	18,92	13,92	14,07	16,18
c. Persewaan	28,33	29,32	32,37	29,39
d. Jasa Perusahaan	12,69	16,38	17,89	14,29
9. JASA-JASA	25,06	16,14	17,79	16,57
a. Pemerintahan Umum	26,47	15,13	16,29	15,69
b. Swasta	16,00	23,21	27,59	21,84
1). Sosial Kemasyarakatan	14,14	24,50	33,42	23,96
2). Hiburan dan Rekreasi	32,63	39,41	41,81	25,64
3). Perorangan dan Rumahtangga	13,49	16,95	16,13	17,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20,89	23,17	24,56	17,85

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 6. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	3,74	4,56	4,18	4,97
a. Tanaman Bahan Makanan	4,49	5,77	5,56	6,12
b. Tanaman Perkebunan	5,26	5,06	5,49	3,09
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,13	1,02	2,17	3,52
d. Kehutanan	(0,88)	2,24	(0,92)	2,65
e. Perikanan	2,86	3,74	2,42	4,78
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	(3,60)	2,36	2,18	2,33
a. Pertambangan Tanpa Migas	28,16	18,48	8,79	7,58
b. Penggalian	(4,79)	1,54	1,79	1,99
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	9,09	7,61	8,29	7,56
4. LISTRIK & AIR BERSIH	4,72	2,26	4,11	3,27
a. Listrik	4,76	2,22	4,20	3,35
b. Air Bersih	2,68	4,34	(0,36)	(0,67)
5. BANGUNAN	4,52	2,48	3,13	3,99
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	7,41	7,19	8,39	8,47
a. Perdagangan Besar dan Eceran	7,61	7,26	8,44	8,60
b. Hotel	-	-	-	-
c. Restoran/rumah makan	3,31	5,51	7,24	5,36
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9,58	10,17	10,58	9,99
a. Pengangkutan	8,55	9,01	9,06	8,41
1). Angkutan Rel	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan Raya	8,65	9,14	9,16	8,50
3). Angkutan Penyeberangan	5,80	5,12	5,92	5,30
4). Angkutan Udara	-	-	-	-
5). Jasa penunjang Angkutan	3,97	2,56	3,68	3,48
b. Komunikasi	17,24	18,20	20,34	19,13
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	9,22	12,63	15,78	16,45
a. B a n k	26,17	13,47	15,19	8,34
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	12,69	6,77	7,85	5,61
c. Persewaan	6,27	12,84	16,34	18,61
d. Jasa Perusahaan	5,75	4,02	7,61	5,06
9. JASA-JASA	5,77	7,68	7,89	8,73
a. Pemerintahan Umum	4,28	5,04	4,80	5,63
b. Swasta	11,49	17,13	17,78	17,57
1). Sosial Kemasyarakatan	11,69	19,08	21,35	19,90
2). Hiburan dan Rekreasi	11,43	22,04	11,06	17,97
3). Perorangan dan Rumahtangga	11,24	13,63	14,17	14,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,34	5,69	5,91	6,41

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 7. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2007-2011

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. P E R T A N I A N	183,96	214,36	250,16	298,24	333,17
a. Tanaman Bahan Makanan	176,77	204,04	235,35	276,53	306,06
b. Tanaman Perkebunan	146,78	176,54	215,47	256,93	297,10
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	196,04	222,97	265,11	322,47	351,79
d. Kehutanan	175,85	196,89	224,04	267,19	289,25
e. Perikanan	206,39	242,34	281,41	340,38	381,25
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	167,53	201,56	222,14	244,74	270,51
a. Pertambangan Tanpa Migas	185,12	185,12	188,11	197,97	209,96
b. Penggalian	166,87	202,40	224,15	247,70	274,55
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	210,83	233,87	286,43	332,55	369,55
4. LISTRIK & AIR BERSIH	278,25	316,12	355,09	404,19	432,71
a. Listrik	281,01	319,14	358,38	407,66	436,11
b. Air Bersih	141,21	163,52	192,27	224,07	249,21
5. BANGUNAN	269,15	291,94	329,15	364,27	391,71
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	170,33	193,20	231,82	285,98	318,75
a. Perdagangan Besar dan Eceran	171,74	193,79	232,90	287,20	319,61
b. Hotel	-	-	-	-	-
c. Restoran/rumah makan	140,32	180,06	207,81	258,37	298,74
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	160,95	182,81	214,76	260,02	286,52
a. Pengangkutan	153,77	177,55	212,46	261,73	285,39
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan Raya	152,84	176,46	211,52	261,04	284,52
3). Angkutan Penyeberangan	289,13	300,63	318,91	335,53	354,05
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa penunjang Angkutan	142,21	184,64	221,18	272,48	314,35
b. Komunikasi	214,77	219,32	229,52	250,10	292,46
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	153,07	179,74	205,75	232,12	254,44
a. B a n k	107,71	113,91	133,56	142,69	153,95
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	184,29	194,48	207,50	219,47	241,44
c. Persewaan	158,96	191,96	220,00	250,31	273,07
d. Jasa Perusahaan	174,79	186,26	208,39	228,30	248,35
9. JASA-JASA	254,57	300,98	324,62	354,42	379,99
a. Pemerintahan Umum	277,81	336,92	369,28	409,76	448,79
b. Swasta	165,70	172,40	181,36	196,45	203,59
1). Sosial Kemasyarakatan	139,13	142,19	148,66	163,43	168,98
2). Hiburan dan Rekreasi	258,83	308,05	351,90	449,31	478,53
3). Perorangan dan Rumahtangga	183,41	187,13	192,60	195,91	201,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	195,46	224,32	261,43	307,48	340,53

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 8. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA - ANGKA PER KAPITA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2007 - 2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU					
1. PDRB A D H PASAR (Juta Rp)	2.766.724	3.344.700	4.119.613	5.131.591	6.047.546
2. Penyusutan (Juta Rupiah)	141.836	171.466	211.192	263.071	310.027
3. PTL Netto (Juta Rupiah)	153.166	185.163	228.062	284.085	334.792
4. PDRN A D BIAYA FAKTOR (Juta Rp)	2.471.722	2.988.072	3.680.359	4.584.436	5.402.727
5. PDRB Perkapita (Rupiah)	7.240.535	8.640.180	10.504.688	12.866.033	14.999.693
B. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000					
1. PDRB A D H PASAR (Juta Rp)	1.415.474	1.491.043	1.575.815	1.668.928	1.775.910
2. Penyusutan (Juta Rupiah)	72.564	76.438	80.784	85.558	91.042
3. PTL Netto (Juta Rupiah)	75.119	79.130	83.628	88.570	94.248
4. PDRN A D BIAYA FAKTOR (Juta Rp)	1.267.790	1.335.475	1.411.402	1.494.801	1.590.620
5. PDRB Perkapita (Rupiah)	3.704.304	3.851.728	4.018.203	4.184.372	4.404.778

¹⁾ Angka diperbaiki

²⁾ Angka sementara

TABEL 9. PERTUMBUHAN PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA - ANGKA PER KAPITA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 - 2011

URAIAN	2008	2009	2010 ⁾	2011 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU				
1. PDRB A D H PASAR	20,89	23,17	24,56	17,85
2. Penyusutan	20,89	23,17	24,56	17,85
3. PTL Netto	20,89	23,17	24,56	17,85
4. PDRN A D BIAYA FAKTOR	20,89	23,17	24,56	17,85
5. PDRB Perkapita	19,33	21,58	22,48	16,58
B. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000				
1. PDRB A D H PASAR	5,34	5,69	5,91	6,41
2. Penyusutan	5,34	5,69	5,91	6,41
3. PTL Netto	5,34	5,69	5,91	6,41
4. PDRN A D BIAYA FAKTOR	5,34	5,69	5,91	6,41
5. PDRB Perkapita	3,98	4,32	4,14	5,27

⁾ Angka diperbaiki

^{*)} Angka sementara

TABEL 10. INDEKS HARGA IMPLISIT PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA - ANGKA PERKAPITA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2007 - 2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010 ⁾	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PDRB ATAS DASAR HARGA PASAR	195,46	224,32	261,43	307,48	340,53
2. Penyusutan	195,46	224,32	261,43	307,48	340,53
3. Pajak Tak Langsung Netto	203,90	234,00	272,71	320,75	355,23
4. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	194,96	223,75	260,76	306,69	339,66
5. PDRB Perkapita	195,46	224,32	261,43	307,48	340,53

⁾ Angka diperbaiki

^{**)} Angka sementara

TABEL 11. PERANAN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 - 2011

URAIAN	2008	2009	2010 ⁾	2011 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	2,01	2,41	2,19	2,56
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	(0,01)	0,01	0,01	0,01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	1,07	0,92	1,03	0,96
4. LISTRIK & AIR BERSIH	0,01	0,00	0,00	0,00
5. BANGUNAN	0,30	0,16	0,20	0,25
6. PERDAGANGAN , HOTEL & RESTORAN	1,20	1,19	1,41	1,46
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,20	0,23	0,24	0,24
8. KEUANGAN, PERSW & JASA PERUSAHAAN	0,10	0,14	0,18	0,21
9. JASA-JASA	0,46	0,62	0,65	0,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,34	5,69	5,91	6,41

⁾ Angka diperbaiki

^{*)} Angka sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ISSN 2085-899X



9 772085 899091